



# Sejumlah Warga Berlagak Miskin

## ■ FORPI Minta Data Penerima KMS Dievaluasi

**YOGYA. TRIBUN** - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (FORPI) Kota Yogyakarta meminta adanya evaluasi dari Pemkot Yogyakarta terkait dengan penerimaan kartu menuju sejahtera (KMS). Pasalnya, ditengarai banyak warga yang memiskinkan diri demi untuk memperoleh KMS.

"Tidak sedikit warga yang memanipulasi data alias memungkir KK orang lain yang benar-benar masuk dalam kategori miskin, rentan miskin, dan fakir miskin," kata Anggota Forpi Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharudin Kamba. Forpi pun mendukung warga yang jujur dan enggan di-

data terkait dengan KMS tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan sebagai bentuk kejujuran warga yang menolak KMS karena merasa memang tidak berhak menerima KMS.

"Artinya taraf hidup layak dan kejujuran perlu dicontoh," katanya.

Selain itu, Forpi juga meminta adanya peningkatan sosialisasi program hingga ke RW/RT.

● ke halaman 11

**LIPUTAN KRUSUS**

### Tidak sedikit warga yang memanipulasi data alias memungkir KK orang lain yang benar-benar masuk dalam kategori miskin.

### Banyak yang Berlagak Miskin

● Sambungan Hal 1

Sehingga tidak ada alasan bagi warga yang tidak tahu soal aturan kecuali memang warga yang benar-benar tidak dapat hadir pada saat sosialisasi.

**Beban petugas**

Dari sisi petugas, kata Kamba, perlu ada petugas jemput bola atau door to door agar program tepat sasaran dan benar-benar dapat memberikan manfaat. Dia melihat beban tugas dari Kelurahan cukup tinggi, sedangkan personel di tingkat Kelurahan sangat minim karena ada staf yang pensiun. Maka, perlu ada penambahan personel di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan agar beban tugas dapat dibagi dengan jumlah perso-

nel yang ada termasuk sarana prasarana yang memadai. Kesejahteraan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat kelurahan perlu dipikirkan ditimbang dengan kapasitas kinerja.

Agar program ini berjalan, kata dia, juga perlu ada sinergis antara program di tingkat daerah dan pusat, misalnya, mana program pemerintah pusat dan mana yang daerah agar supaya tidak over load program.

"Misalnya, KIS itu program pemerintah pusat, maka, tidak perlu lagi ada program yang sama ditingkat daerah," papar Kamba.

**Stiker miskin**

Kepala Bidang (Kabid) Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Esti Setyarsi menjelaskan, KMS adalah kartu identitas bagi yang terdapat sesuai parameter program pengentasan kemiskinan. Sehingga, KMS bukan merupakan sebuah program namun identitas yang menunjukkan warga masuk dan terdaftar di program pengentasan kemiskinan.

"Kami juga memberikan tanda pada warga yang mendapat KMS. Tanda ini berupa stiker ditempel di rumah," paparnya kepada *Tribun Jogja*, Senin (12/3).

Esti menjelaskan, pemberian tanda tersebut akan menunjukkan keluarga tersebut memperoleh bantuan. Sehingga, jika ada yang berpura-pura miskin akan sangat ketahuan dan menanggung sanksi sosial.

Sementara, dia menambahkan, beberapa fasilitas yang didapatkan untuk pemegang KMS di antaranya, anak-anak pemegang KMS yang masih sekolah mendapat jaminan pendidikan dari TK sampai SMA/SMK.

Bagi penerima KMS yang rumahnya yang tidak layak ada bantuan rehab rumah tak layak huni. Pemegang KMS yang meninggal dunia mendapat santunan kematian.

Lansia masih potensial yang punya kegiatan usaha ekonomi produktif misalnya jualan, bisa dapat bantuan modal usaha. Lansia yang tidak bisa apa-apa dapat jaminan hidup. Pemegang KMS dijamin kesehatannya.

"Tidak ada bantuan per bulan berapa atau per tahun berapa tergantung program dan disesuaikan kondisi pemegang KMS," jelasnya.

Esti menambahkan, setiap SKPD juga memiliki sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan. Hal inilah yang nantinya akan disesuaikan pada penerima KMS, tergantung dari hasil pendataan kondisi di lapangan. (adisa)

## Petugas Lapangan Sering Ewuh Pakewuh

**WAKIL** Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardyanto menilai pemberian Kartu Menuju Sehat-tera (KMS) dirasa sudah tepat sasaran. Fokki mengatakan, dari pengamatannya, sebanyak 80 persen KMS yang dibagikan kepada keluarga kurang mampu sudah tepat sasaran. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 20 persen kurang tepat sasaran.

"Yang 20 persen kurang tepat sasaran. Biasanya karena human error, misalnya ewuh pakewuh atau ada kepentingan lain biasanya untuk masuk sekolah negeri karena ada kuota KMS," kata politisi Partai PDI-P ini.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Sosial Kota Yogya agar selalu mengevaluasi dan mengubah parameter warga yang berhak mendapatkan KMS. "Parameter harus selalu berubah dan dievaluasi mengikuti perkembangan jaman," ujar dia.

Sebab, lanjut Fokki, dari catatan dewan, masih banyak warga yang mengadu lantaran dia tidak mendapatkan KMS.

"Masih banyak aduan yang masuk, tapi tidak sampai 10 persen. Aduan yang masuk berkisar kepada pertanyaan mengapa saya tidak dapat KMS," jelas Fokki.

● ke halaman 11

### Petugas Lapangan Sering Ewuh

● Sambungan Hal 1

Untuk Dewan meminta agar Dinas Sosial lebih transparan dalam pengambilan kebijakan terkait pengedaran KMS ini. "Harus ada sinkronisasi data saja sebenarnya baik data versi Kemensos dan Dinsos. Serta ada transparansi di dalam permasalahan KMS mulai dari hulu yaitu pendataan sampai dengan hilir yaitu proses pengambilan kebijakan," pungkasnya.

**Evaluasi data**  
Sementara itu, Pitt Kepala Dinsos Kota Yogyakarta Bedjo Suwamo mengatakan, pihaknya selalu mengevaluasi peredaran KMS di setiap

tahunnya. "Bulan-bulan ini kita sedang evaluasi untuk tahun depan. Resikonya di satu sisi KMS hanya untuk santunan kematian, karena kesehatan sudah terangkap BPJS, pendidikan sudah terangkap dengan zonasi," kata Bejo.

"Yang pasti kami evaluasi. Setiap tahun kami lakukan pendataan apakah yang bersangkutan masih pantas," jelasnya.

Bejo juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan surat usulan penerima KMS kepada Walikota, surat usulan tersebut pun sudah ditandatangani langsung oleh Haryadi Suyuti. "Sudah disampaikan ke Walikota. Harapan kami begitu diluncurkan para penerima KMS bisa langsung menggunakannya," tambah

Bejo.

Namun, sebelum dicetak dan didistribusikan kepada para penerima, lanjut Bejo, pihaknya akan menggelar uji publik layakkah warga tersebut menerima KMS, yang mana dalam uji publik tersebut akan diundang RT/RW di masing-masing Kelurahan di Kota Yogya.

Bejo juga menjelaskan bahwa di tahun ini ada 4 kategori penerima KMS, di antaranya warga benar-benar miskin, warga miskin, warga rentan miskin dan mereka yang sebenarnya tidak layak mendapat KMS, tetapi mereka akan kembali menjadi penerima KMS tahun depan jika tidak memperoleh KMS tahun ini. "Setiap tahunnya penerima KMS akan kita ganti," tandasnya. (als/sls)

indak l

tuk Dite

tuk Dik

mpa Pe

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005